BULLETIN OF MANAGEMENT AND BUSINESS
http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/bmb/index
P-ISSN : 2745-6927
E-ISSN : 2722-2373

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan

Gresensia Elisabeth Tori[1*], Ana Sopanah S[2], Endah Puspitasari[3]
[1]Universitas Widyagama Malang, [2] Universitas Widyagama Malang, [3] Universitas Widyagama Malang
*Email koresponden: greztori@gmail.com

Received : Desember/2022 (editor only)
Revised : Januari/2023 (editor only)
Accepted : Februari/2023 (editor only)

ABSTRAK:
Tingkat pengukuran sistem kinerja keuangan bisa dikatakan merupakan hal yang jauh lebih penting untuk dapat dilakukan untuk dapat melihat pada tingkat pencapaian suatu misi yang telah dijalankan dalam suatu kelompok atau organisasi dan pada tingkat dari suatu hasil dalam tindakan yang diukur. akan dapat memberikan motivasi tindakan serta arah untuk masa depan yang jauh lebih efektif. Seperti pada hasil penelitian ini dapat diketahui tingkat keahlian sistem kerja keuangan PDK di Kota Malang periode 2017-2020 jika dapat diketahui berdasarkan rasio independensi yang masih berbentuk konsultatif, yang dapat dikatakan minimal, hal ini dikarenakan dalam sistem peran yang ada pada pihak pemerintah pusat dengan tujuan dapat memaksimalkan sistem pembangunan yang ada di kota Malang jauh lebih baik dan tingkat kemandirian di tingkat masyarakat untuk dapat membangun suatu daerah dalam membayar retribusi dan perpajakan dapat dikatakan masih minim. Diketahui rasio efektivitas kemampuan suatu daerah di Kota Malang yang dapat melaksanakan realisasi pendapatan asli daerah periode 2017-2020 sesuai dengan target yang akan diterapkan berdasarkan data riil. Terlihat bahwa berdasarkan rasio efisiensi dan sistem kinerja pemerintah Kota Malang periode 2017-2020 dinyatakan baik.

***Kata Kunci**:* Pengukuran Kinerja, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan

ABSTRACT:
The level of measurement of the financial performance system can be said to be a far more important thing to be able to do to be able to see at the level of achieving a mission that has been carried out in a group or organization and at the level of an outcome in an action on which measurement. will be able to provide an action on motivation as well as a direction for a much more effective future. As in the results of this research, it can be seen that the level of expertise in the PDK financial work system in Malang City for the 2017-2020 period if it can be known based on an independence ratio which is still in a consultative form, which can be defined as minimal, which is due to in the system of existing roles on the part of the central government with the aim of being able to maximize the existing development system in the city of Malang, it is much better and the level of independence at the level of society to be able to build an area in paying retribution and taxation can be stated to be minimal. It is known that an effectiveness ratio in the ability of an area of Malang City which can carry out a realization of regional original income in the 2017-2020 period as with a target that will be applied based on real data. It can be seen that based on an efficiency ratio and the performance system of the Malang City government in the 2017-2020 period is declared good

***Keywords**: Performance Measurement, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Compatibility Ratio, Growth Ratio*

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah secara umum menjelaskan mekanisme atas dikasihkan wewenang, kewajiban serta hak daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri perihal kepentingan masyarakat setempat dan pemerintah dalam sistem NKRI, termasuk masalah di bidang administrasi, ekonomi serta politik dan pengaturan keuangan daerah. Pemberian otonomi daerah ditujukan untuk memicu kemandirian daerah dalam mengembangkan dan menggali sumber daya yang dimilikinya. Peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah merupakan tujuan utama pemberian wewenang kepada daerah otonom (Ardhini, 2011). Pengaturan keuangan daerah seperti telah tertuang pada Anggaran serta Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didasarkan atas asas desentralisasi yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan rasio kinerja keuangan tersebut maka dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pembagian APBD satu daerah bisa disebutkan efisien, efektif, ekonomis sesuai prinsip pengaturan keuangan daerah di zaman otonomi daerah ialah value for money. Dengan begitu rasio itu juga bisa menunjukkan kemandirian pemerintah daerah, pergeseran tren porsi pertumbuhan dan pendapatan, pembiayaan daerah serta belanja dari periode ke periode serta tenaga kerja serta tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Bagian penilaian kinerja yaitu rasio keuangan yang dibentuk dengan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu berupa hitungan APBD. Pada penilaian parameter kinerja minimal 4 dasar penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah: efisiensi biaya, penyimpangan antara realisasi anggaran bersama tujuan yang ditentukan dalam APBD, pemerataan serta efektivitas program. Selain 4 indikator tersebut pemerintahan daerah dapat melakukan kajian rasio keuangan menggunakan alat tolak ukur saat menilai efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan PAD, keserasian.

KAJIAN PUSTAKA

Berbagai penelitian tentang topik penelitian ini sudah dilakukan oleh Hery Susanto (2019) dengan judul "Analisis rasio keuangan guna mengukur kinerja keuangan pemerintah wilayah kota Mataram. Riset ini memakai metode kuantitatif bersama pendekatan deskriptif. Dengan tujuan penelitan ini kinerja keuangan pemerintah wilayah kota mataram memakai perhitungan rasio efektivitas dianggap efektif yang berarti pemerintah wilayah kota mataram saat merealisasikan. Pendapatan asli wilayahnya dianggap telah efektif, tapi bersumber hitungan rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah wilayah kota mataram dianggap minim efisiensi. dan perhitungan rasio Kemandirian dianggap masih kurang serta pengaturan keuangan wilayah juga dianggap masih minim. Variabel yang dipakai pada riset ini ialah rasio kemandirian, kinerja keuangan, rasio efisiensi serta rasio efektivitas. Persamaan riset ini ialah sama-sama meriset perihal kinerja keuangan pemerintah wilayah bersamaan mamakai rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio efektivitas.

Mailangkay dkk (2020) berjudul " Analisis kinerja keuangan wilayah pemerintah kota blitung". memakai metode kuantitatif bersamaan pendekatan deskriptif. Riset ini menampilkan jika tugas pemerintah pusat pada keuangan wilayah kota blitung terus dominan. Bersumber hitungan rasio efektivitas pola kerja keuangan pemerintah wilayah kota blitung dilihat telah baik. Bersumber perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah wilayah Kota Blitung dianggap telah baik. Variabel yang dipakai kinerja keuangan, serta rasio efektivitas. Persamaan riset ini ialah sama-sama meriset mengenai kinerja keuangan memakai analisis rasio efektivitas. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Adrian Irnanda Pratama (2020) perihal "Analisis rasio keuangan saat menilai kinerja keuangan pemerintah kabupaten Siak tahun angaran 2013-2017" Memakai metode kuantitatif. Beserta tujuan riset ini menampilkan jika kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Siak disukat

memakai rasio kemandirian keuangan wilayah memperlihatkan begitu rendah, rasio efisiensi keuangan wilayah memperlihatkan efisien, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menampilkan efektif. Variabel yang dipakai pada riset ini ialah kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas serta rasio efisiensi. Persamaan pada riset sekarang ialah sama-sama meriset mengenai kinerja keuangan bersamaan memakai rasio kemandirian, rasio efektivitas serta rasio efisiensi. Perbedaan diriset saat ini ialah lokasi riset saat ini di Badan Pengelola Keuangan serta Aset Daerah (BKAD), Kota Malang Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Riset ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan membuat perhitungan tentang data keuangan yang didapat untuk menyelesaikan kendala yang ada. Riset ini memakai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilaksankan guna menemukan nilai variabel mandiri tanpa menciptakan perbandingan ataupun menyatukan dengan variabel lain.

2) Lokasi Penelitian

Cara terbaik yang perlu dilewati pada penentuan tempat riset ialah mempelajari pula mendalami rumusan masalah riset. Untuk itu, ketika mengumpulkan data yang diinginkan guna menyelesaikan riset ini, maka tempat riset yang dilaksanakan oleh peneliti ialah di Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) Kota Malang yang bertempat di jl. Simpang Majapahit No. 1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang.

3) Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Pada riset ini yang menjadi subjek riset ialah Badan Keuangan serts Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu yang menjadi perhatian pada riset. Objek riset yang menjadi tujuan pada riset ini berfungsi guna menemukan solusi maupun jawaban yang bersumber dari konflik yang terjadi. Objek riset ialah sesuatu yang akan diriset, yang dianalisa serta dikaji. Objek riset ini ialah hal yang menyangkut Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kota malang dengan memakai analisis rasio keuangan.

4) Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Kinerja keuangan dasarnya dilaksanakan guna menilai kinerja di masa lampau bersama melaksanakan berbagai analisa lalu bisa ditemukan posisi keuangan yang menyulih realitas entitas serta potensi kinerja yang berlanjut. Dimana kinerja keuangan daerah dapat ditimbang bersama memakai rasio keuangan wilayah yaitu:

1. Rasio Kamandirian

   Rasio kemandirian keuangan daerah, ditampilkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah disbanding bersama pendapatan daerah yang bersumber dari hal lain (pendapatan transfer).

   Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = \frac{\textbf{Pendapatan Asli Daerah}}{\textbf{Bantuan Pusat Pemerintah dan Pinjaman}} \textbf{ X 100\%}$$

2. Rasio Efektivitas

   Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah,. Yang mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah saat menjalankan Pendapatan Asli Daerah

yang telah dirancang dibanding dengan target yang ditentukan bersumber dari potensi riil daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{\textbf{Realisasi Pendapatan}}{\textbf{Target Penerimaan PAD}} \textbf{ X 100\%}$$

3. Rasio Efesiensi

   Rasio Efisiensi keuangan daerah, melukiskan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan guna menemukan realisasi belanja daerah bersama realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima.

   Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{\textbf{Realisasi Belanja}}{\textbf{Realisasi Pendapatan}} \textbf{ X 100\%}$$

4. Rasio Keserasian

   Rasio ini melukiskan bagaimana pemerintah daerah mengutamakan alokasi danan pada belanja pembangunan serta belanja operasi secara maksimal. Semakin tinggi presentase dana yang disisipkan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang dipakai guna menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\textbf{Rasio Operasi} = \frac{\textbf{Total Belanja operasi}}{\textbf{Total APBD}} \boldsymbol{X}\ \textbf{100\%}$$

$$\textbf{Rasio Modal} = \frac{\textbf{Total Belanja modal}}{\textbf{Total APBD}} \boldsymbol{X}\ \textbf{100\%}$$

5. Rasio Pertumbuhan

   Rasio ini dipakai guna melihat pertumbuhan positif ataupun negatifnya anggaran dari periode ke periode. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\textbf{Penerimaan tahun lalu - Penerimaan tahun sekarang}}{\textbf{Penerimaan tahun lalu}} \boldsymbol{X}\ \textbf{100\%}$$

5) Sumber Data serta Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

   Sumber data pada riset kuantitatif terbagi menjadi 2 macam jenis yaitu sumber data primer merupakan sumber data yang datanya langsung diberikan kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang

datanya tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, contoh: melalui orang lain ataupun melalui dokumen (Sugiyono, 2010 :193).

2. Teknik Pengumpulan Data
   a) Observasi
      Observasi ialah teknik mengumpulkan data yang dilaksanakan lewat suatu pengamatan, berserta pencatatan kepada keadaaan ataupun sikap objek sasaran. Metode observasi yaitu melaksanakan pengawasan secara langsung ke objek riset guna melihat dari dekat kegiatan yang dilaksanakan oleh periset di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang**.**
   b) Wawancara
      Wawancara ialah bentuk hubungan antara 2 orang yang menyangkut seseorang yang mau mendapat informasi dari orang lain beserta mengajukan pertanyaan, bersumber tujuan tertentu. Wawancara dilaksanakan langsung dilokasi periset beserta menunggangi informasi yang ada.
   c) Dokumentasi
      Dokumentasi ialah cara mengiumpulkan data beserta mempelajari catatan-catatan mengenai data atau informasi yang berhubungan serta masalah yang diriset.

6) Metode Analisis Data

A. Analisis Data

Analisis data yang dipakai pada riset ini ialah analisis deskriptif, yaitu salah satu metode analisis yang terlebih dulu mengumpulkan data, menafsirkan dan mengklarifikasi data sehingga bisa mengasihkan gambaran yang pasti tentang masalah yang diriset, berikut langkah-langkahnya :

1. Data-data yang dibutuhkan pada riset ini dikumpulkan di objek penelitian.
2. Menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan berdasarkan data yang didapat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang
3. Membuat grafik untuk mengetahui laju pertumbuhan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian serta rasio pertumbuhan dari periode 2017 sampai 2020.
4. Menganalisis serta membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan daerah kepada Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) dari periode 2017 sampai 2020.
5. Menarik Kesimpulan atas perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian, pertumbuhan berdasarkan kriteria dari masing-masing rasio yang sudah ditetapkan. Sehingga bisa dilihat bagemana kinerja keuangan pemerintah Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Rasio Kemandirian

Tabel 4.1
Perhitungan Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun An ggaran 2017 – 2020 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Bantuan Pusat & Pinjaman		Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
		Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
2017	588.276.962.084,13	1.174.719.580.753,00	10.305.000.000,00	49%	Rendah
2018	556.888.383.143,67	1.181.289.819.588,00	68.817.280.000,00	44%	Rendah
2019	588.066.042.351,01	1.203.245.896.321,00	67.075.400.000,00	46%	Rendah
2020	491.189.243.955,35	1.098.463.668.428,00	90.756.375.316,00	41%	Rendah

Sumber : BKAD Kota Malang, 2022 (data diolah)

Berdasarkan data yang diolah, bisa diperhatikan jika kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang di empat periode yang diukur menggunakan analisis rasio kemandirian menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam setiap tahun. Namun, peningkatan daya tarik masyarakat saat membangun daerah guna membayar pajak dari periode 2017 sampai periode 2020 partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.

Dari data tabel diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018 partisipasi masyarakat dalam hal membangun daerah dan membayar pajak mengalami penurunan sebesar 5%, untuk tahun 2018 hingga 2019 partisipasi masyarakat untuk membangun daerah mengalami peningkatan sebesar 2%, dan tahun 2019 sampai 2020 dapat dilihat partisipasi mengalami penurunan sebesar 5%.

Hasil perhitungan tersebut bisa disimpulkan jika tahap kemandirian pemerintah wilayah Kota Malang pada periode 2017 sampai 2020 masih tergolong rendah, hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika peran pemerintah masih terlalu dominan dalam hal membantu pembangunan wilayah Kota Malang dibandingkan PAD yang diperoleh pertahun.

4. Rasio Efektivitas

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 – 2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Efektivitas	Keterangan
2017	588.276.962.084,13	514.963.444.965,56	110%	Sangat Efektif
2018	556.888.383.143,67	528.207.937.856,91	105%	Sangat Efektif
2019	588.066.042.351,01	613.052.028.554,00	95%	Efektif

2020	419.189.243.955,35	532.371.417.403,28	78%	Kurang Efektif

Sumber : BKAD Kota Malang, 2022 (data diolah)

Pada tabel 4.2 diatas, diketahui jika pengelolaan keuangan pemerintah wilayah Kota Malang selama empat periode menunjukkan hasil lebih besar dari 100%, ini artinya pemerintah daerah Kota Malang sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya. Data tersebut dapat dilihat pada periode 2017 yakni sebanyak 110%, periode 2018 sebanyak 105%, periode 2019 sebanyak 95%. dan pada tahun 2020 sebesar 78%.

Pada periode 2017 dan 2018 terjadi kenaikan nilai efektivitas sebanyak 5% Pada periode 2019 dan 2020 terjadi kenaikan nilai efektivitas sebesar 10% di tahun 2019, dan 17% pada tahun 2020. Kenaikan sebesar 10% pada tahun 2019 diakibatkan hal penerimaan dari setiap retribusi daerah serta sektor pajak melebihi yang dialokasikan yang lalu. Pemerintah daerah Kota Malang juga bisa disebutkan mempunyai kinerja yang baik perihal melaksanakan PAD yang sudah diagendakan pemerintah wilayah Kota Malang wajib selalu memaksimalkan penerimaan dari potensi prndapatan yang telah ada pemerintah wilayah Kota Malang diinginkan tidak terus terpaku bersama target yang sudah ditetapkan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alternatif yang memmungkinkan guna meningkatakan potensi wilayah antara lain mencari sumber pembiayaan baru baik lewat program kerjasama pembiayaan bersama pihak swasta serta juga program peningkatan PAD, seperti pendirian BUMB sektor potensial.

5. Rasio Efesiensi

Tabel 4.3
Pehitungan Analisis Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 – 2020

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
2017	1.473.423.083.084,68	1.971.916.657.660,13	74%	Efisien
2018	1.573.833.302.429,69	2.040.194.240.906,67	77%	Efisien
2019	1.669.892.391.899,53	2.187.985.479.986,01	76%	Efisien
2020	1.685.625.501.405,51	1.956.090.185.104,35	86%	Cukup Efisien

Sumber : BKAD Kota Malang, 2022 (data diolah)

Pada tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Malang dalam empat tahun dari tahun 2017 sampai 2020 menghasilkan kinerja keuangan yang efisien , karena dapat dilihat hasil perhitungannya dibawah rata-rata 100% , yaitu sebesar 74% pada tahun 2017, 77% pada tahun 2018, 76% pada tahun 2019 dan 86% pada tahun 2020.

Dari hasil perhitungan data tahun 2017 sampai 2020 dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan dan juga peningkatan belanja pada setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap koefisienan kinerja 100% artinya dari dana pendapatan yang

diperoleh dalam setiap tahun masih mengalami sisa dari total belanja, sisa inilah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai keperluan pada pemerintah Kota Malang itu sendiri. Karena semakin kecil persen perhitungan efisiensinya, maka dana sisa yang dimilki dari total belanja akan semakin meningkat.

Sementara tahun 2020, pendapatan dan belanja yang diperoleh mengalami penurunan. Terjadinya penurunan terhadap belanja daerah dikarenakan pendapatan daerahnya yang semakin menurun. Hal ini dilakukan agar dana kas daerah yang dimiliki harus memiliki sisa untuk membiayai keperluan yang lainnya.

4.Rasio Keserasian

Tabel 4.5

Pehitungan Analisis Rasio Keserasian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 – 2020

Tahun	Total belanja	Belanja operasi	RBM	Keterangan
2017	355.460.934.019	81.463.378.942	22,9 %	Tidak Baik
2018	416.397.338.772	89.474.914.520	21,4 %	Tidak Baik
2019	467.213.658.063	106.387.656.837	22,7%	Tidak Baik
2020	534.128.440.826	138.012.375.705	25,8 %	Tidak Baik

Sumber : BKAD Kota Malang, 2022 (data diolah)

Bersumber dari jumlah perhitungan pada tabel di atas ditemukan jika rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Kota Malang ialah 23,2%. Dimulai saat periode 2017 dimana rasionya sebanyak 22,9% mengalami penurunan pada periode 2018 jadi 21,4%, lalu mengalami kenaikan jadi 22,7% pada periode 2019. Periode 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 25,8%.

Dari uraian serta perhitungan tersebut jilka sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diutamakan guna kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini bisa dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibanding rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana guna belanja operasi terutama disebabkan besarnya dinas otonomi serta belanja pegawai guna gaji PNS. Dengan ini bisa memperlihatkan jika Pemerintah Kota Malang yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin guna pemenuhan aktivitas Pemerintahan serta belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan belum adanya patokan yang pasti guna belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Malang belum terpenuhi.

5.Rasio Pertumbuhan

Tabel 4.6

Pehitungan Analisis Rasio pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 – 2020

Tahun	Pendapatan awal	Pendapatan akhir	Rasio pertumbuhan pendapatan
2017	514.963.444.965,56	588.276.962.084,13	514,96 %
2018	528.207.937.856,91	556.888.383.143,67	528,20%
2019	613.052.028.554,00	588.066.042.351,01	613,05%
2020	532.371.417.403,28	419.189.243.955,35	532,37%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Ditemukan dari hasil perhitungan dengan rasio pertumbuhan diatas pendapatan daerah pemerintah Kota Malang yang diukur selama 4 periode, dimana pada periode 2017-2019 mengalami penurunan serta pada periode 2020 rasio pertumbuhan mengalami kenaikan. Guna periode 2017 rasio pertumbuhan pendapatan sejumlah 514,96%, periode 2018 sejumlah 528,20%, serta periode 2019 sejumlah 613,05%. Dan pada periode 2020 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan menjadi 532,37%. Rasio pertumbuhan bermanfaat guna mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode anggaran bersangkutan ataupun selama beberapa periode anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataupun negatif. Hal ini bisa disimpulkan jika pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kota Malang untuk periode 2017-2020 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi disebabkan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Malang.

REFERENSI

Amin, H. (2019). Analisa pengukuran kinerja pada pelayanan jasa taksi puskopau menggunakan metode performance primn (studi kasus: poskopau pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Halim, A., & Kusufi, M .S. (2010)._"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"._Jakarta:SalembaEmpat.

Handayani, B. D. (2011). Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada RSUD Kabupaten Kebumen. JDM (Jurnal Dinamika Manajemen), 2(1).

Hariyanti, D., Marheni, & Yenfi. (2017)._"Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015". Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan STIE-IBEK, 10 (November), 48–59.

Hasan, Pupung Puad. (2017)._"Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat"._Jurnal Wacana Kinerja, Vol.17, Edisi 2.

Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018)._"Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo"._Jurnal Ecobuss, 6 (September), 26–35.

Kartika, D., & Kusuma, I. (2015)._"Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi"._Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol.1No.2.

Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018)._"Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas"._Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 16(1), 1–14.

Mahsun, M. (2019)._"Konsep Dasar Penganggaran: Penganggaran Sektor Publik". http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4403-penganggaran-sektorpublik/#tab-id-3

Maisyuri. (2017)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe"._Jurnal Akuntansi dan Keuangan,5(1),51.

Mailangkay, P. P., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(3Akuntansi

Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020)._"Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat". Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35.

Nordiawan, D. (2018)._" Akuntansi Pemerintahan”._Jakarta:SalembaEmpat. 7

Nur Ida Iriani. (2021). Kinerja Keuangan Ditinjau dari Perimbangan Kemandirian, Perimbangan Efektivitas, Perimbangan Efisiensi dan Perimbangan Pertumbuhan Pada Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol.9, No.1, 2021

Nurhayati, N. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Cano Ekonomos, 4(1), 55-66.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah legalitas pembentukan dan operasional SKPD

Puspitasari, A. F. (2012)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011"._Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida, 1(1).

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2014._"Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".

Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011)._"Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah"._Media Riset Akuntansi,Vol.1.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7, 81-92.

Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan". Jurnal Akuntansi, 5(2), 111–124.

Tarmizi, R., Khairudin, K., & Jayadi, A. (2014)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP"._Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2).

Yusuf, A. M. (2016)._"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Prenada Media.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.